

AKTIVISME DAN PERILAKU POLITIK ISLAM: TEORI, PEMIKIRAN DAN GERAKAN

Syahrir Karim

Samsu Adabi Mamat

Political Science Programme, The Faculty of Social Sciences and Humanities
The National University of Malaysia
E-mail: syahrirkarim@gmail.com

Abstract : Islam at most cases is frequently considered more than a religion per se. This is reinforced by the emergence of different schools of jurisprudence, theology, and Islamic philosophy, which indicates the multi-interpretative Islamic teachings. This multi-interpretative character of Islam has served as the basis of Islamic elasticity within its long history. Furthermore, this character also indicates the presence of pluralism in Islamic tradition. This has always been a challenge as well as surging classic debate in Islamic activism and in developing future democratization. Islam as Muslims believe has shaped Islamic movements in their national and democratic life. The core of such a view lies deep inside human consciousness that religion should actually work within the very human life instead of being formally acknowledged to rule the life of human beings as certain nation citizens.

Secara umum bahwa pola dasar yang dihadapi politik Islam dalam hubungannya dengan negara adalah adanya kesulitan untuk membangun sintesis yang memungkinkan di antara keduanya. Faktor utama yang menyebabkan kemandegan politik ini adalah keinginan para pemikir dan aktivis politik Islam untuk membangun hubungan Islam dan Negara secara legalistik dan formalistik. Proses politik dan aktivisme Islam dari beberapa gerakan yang ada khususnya pasca reformasi telah memberikan warna tersendiri terhadap perpolitikan di Indonesia.

Keywords: Islamisme, Demokrasi, Gerakan Islam Dan Perilaku Politik

I. Pendahuluan

Islam adalah agama monoteistik yang disebarkan oleh nabi Muhammad SAW, Alquran dan Sunah merupakan sumber atau pedoman bagi umat untuk melakukan hubungan-hubungan sosial dan politik. Sehingga, umat Islam (juga non Islam) pada umumnya mempercayai watak holistik Islam sebagai instrument ilahiah untuk memahami dunia. Islam seringkali dipandang lebih dari sekedar agama, untuk itu pandangan tersebut menyatakan bahwa Islam tidak mengakui tembok pemisah antara yang spiritual dan yang temporal, melainkan mengatur semua aspek kehidupan. Bagi Hassan Hanafi, bahwa term "Islam" yang umum harus dimaknai sebagai "sebuah agama tertentu". Menurutnya, term ini sebaiknya diganti dengan term 'pembebasan' (*taharrur*)

sebagaimana disimbolkan dalam syahadat. Menurutnya lagi, 'Islam' berarti pembebasan kesadaran manusia dari kekuatan-kekuatan tiran. 'Islam' memang juga bermakna "penyerahan", tetapi makna tersebut telah dimanipulasi oleh kaum elit menjadi "penyerahan" kepada penguasa sebagai implementasi dari penyerahan kepada Tuhan. Karena itu, Hanafi lebih menekankan pada makna lain dari kata "Islam", yakni "protes, oposisi, dan revolusi".¹ Dari pemekanaan tersebut maka Islam banyak dipandang lebih dari sekedar agama, maka menimbulkan beberapa bentuk aktivisme Islam yang sering disebut dengan Islamisme.

Dalam dunia muslim, hampir semua gerakan Islam telah menempatkan ideologi dalam posisi dan fungsi yang sangat penting. Gerakan-gerakan Islam seperti *Ikhwanul Muslimin* di Mesir, *Jama'at Islam* di Pakistan, dan gerakan-gerakan Islam di Indonesia seperti Syarikat Islam dan Masyumi, lahir dan tidak lepas dari ideologi.² Pandangan yang mempertautkan Islam sebagai ideologi, dalam makna Islam sebagai agama yang menyeluruh menyangkut segenap aspek kehidupan termasuk politik dan memproyeksikan Islam itu secara langsung atau integral dengan kehidupan politik atau negara.

Kelompok Islam yang membangkitkan kembali label formal Islam dan penerapan syari'at Islam, tergolong Islam ideologis atau dalam istilah yang belakangan populer disebut Islamisme. Dikatakan Islam ideologis karena watak dan orientasi keagamáannya berbasis pada pandangan Islam sebagai ideologi, yang mempertautkan secara langsung hubungan Islam dengan negara atau politik serta memperjuangkan cita-cita politik Islam.³ Islamisasi harus dilakukan melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan sosial dan politik. Bagi kaum Islamis, keterlibatan dalam politik berpijak pada Islam sebagai sistem pemikiran yang umum dan menyeluruh (*Islam is a global and synthesizing system of thought*), masyarakat Islam dalam berbagai landasan dan struktur kehidupannya haruslah Islami.⁴

¹ Nanang Tahqiq (ed.), *Politik Islam*, Kencana, Jakarta, 2004. h. 226.

² Islam sebagai ideologi (*Islamic Ideology*) didasarkan pada sebuah pemikiran bahwa Islam sebagai agama yang bersifat universal ("*Islam as a universal religion*"), berdasar pada anggapan bahwa Islam adalah azas yang sempurna.

³ Islamisme (Gerakan Islam ideologis) dapat dilihat pada konteks partai-partai Islam dan gerakan-gerakan Islam non-partai politik.

⁴ Masdar Hilmy, *Islamism and Democracy; Piety and Pragmatism*. Meskipun dalam perkembangannya Islamisme ini sering disejajarkan dengan marxisme. Islamisme kenapa kemudian banyak orang tertarik karena dasar gerakannya adalah berangkat dari fenomena sosial-politik suatu negara yang banyak bermasalah sehingga Islamisme kemudian menawarkan suatu solusi kebangsaan dengan menawarkan penegakan syariah sebagai solusi. Sama halnya dengan banyaknya orang yang tertarik dengan ideologi marxis karena marxisme menawarkan sebuah teori keadilan, bahwa kapitalisme harus dilawan demi terwujudnya keadilan sosial dalam suatu negara. Lalu kenapa kemudian Islamisme dibenci oleh sebahagian kalangan karena Islamisme ini dianggap memaksakan kehendak dan tidak menghormati pluralisme. Contohnya adalah kritik terhadap formalisasi syariah. Syariah tidak boleh dipaksakan masuk pada wilayah kebijakan negara karena itu adalah ruang publik (*public sphere*). Untuk lebih jelasnya lihat, Peter Baehr, *Marxism and Islamism: Intellectual Conformity In Aron's time and Our Own*, *Journal Of Classical Sociology* (2011) 11: 173

II. Aktivisme dan Perilaku Politik

Aktivisme Islam sering juga dikonotasikan dengan istilah Islamisme. Islamisme merupakan deskripsi Barat, yang menjelaskan tentang bentuk aktivisme Islam yang muncul pada seperempat awal abad ke-20. Dalam pemaknaannya, Islamisme memiliki empat ciri: pertama, mengusung kebangkitan Islam sebagai basis reformasi masyarakat; kedua, memahami Islam sebagai ideologi; ketiga, memiliki tujuan mendirikan sistem Islami atau negara Islam (al-nizham al-Islami); keempat, baginya, ciri negara atau sistem politik negara adalah penerapan syariah (berdasar pada hukum Islam).⁵

Oleh Hasan Al-Banna, gerakan Islam yang selalu berpandangan bahwa Islam adalah bagian integral dalam politik atau negara disebut dengan "*Islamiyyah*" (Islamiyah). Sedangkan dalam wacana kontemporer dikenal dengan "*Islamism*" (Islamisme). Para Islamiyah disebut "*Islamiyyun*", sedangkan pengikut Islamisme disebut "Islamis". Islamiyah dalam makna mutakhir (kontemporer) sebagaimana diperkenalkan para sarjana Barat yang mempelajari Islam dan fenomena gerakan-gerakan fundamentalisme Islam, sepadan dengan istilah atau konsep "*Islamisme*" (*Islamism*). Islamisme merupakan fenomena gerakan Islam kontemporer yang memandang Islam sebagai ideologi politik, termasuk yang membawa kecenderungan neo-fundamentalisme yang sangat peduli pada syariat Islam.⁶

Dalam pandangan lain, Islamisme diartikan sebagai sebuah keyakinan bahwa Islam memiliki seperangkat norma atau ajaran yang komprehensif dan unggul, yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk ketertiban atauran sosial.⁷ Dimanapun kaum Islamis berusaha mengganti aturan sosial-politik yang ada dengan norma atau ajaran yang didasarkan tafsir tertentu atas ajaran Islam. Usaha-usaha tersebut bisa ditempuh melalui aksi-aksi atau gerakan damai ataupun kekerasan tergantung oleh sistem nilai yang diyakini oleh aktor-aktor gerakan Islamis tersebut. Lebih lanjut, bahwa Islamisme (orientasi politik Islamis) merupakan sesuatu yang krusial dalam mendefinisikan sejauhmana seorang muslim di anggap Islamis atau tidak. Beberapa ahli tentang masyarakat muslim, seperti Lewis dan Gellner, ataupun sarjana ilmu politik, seperti Huntington dan Kedourie, mencoba membuktikan bahwa Islamisme merupakan hal universal bagi kaum Muslim. Bagaimana mengukur Islamisme, satu cara untuk melakukan hal tersebut adalah mengetahui bagaimana para

⁵ Anthony Bubalo, Greg Fealy & Whit Mason. 2012. *Zealous Democrats: Islamism and Democracy in Egypt, Indonesia and Turkey*. Terjemahan oleh Syamsu Rijal, PKS dan Kembarannya; Bergiat jadi demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki. Jakarta, Komunitas Bambu. H.5

⁶ Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syari'at; reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Jakarta 2007. Meskipun dalam berbagai kesempatan kaum Liberal menyoroti Islamisme. Bagi mereka Islamisme adalah sebuah gerakan yang menyalahi konsep politik modern. Islamisme sama halnya dengan kaum Fasisme yang telah menjadi musuh terhadap demokrasi dan kebebasan. Lebih jelasnya lihat, Arun Kundnani, *Islamism and the Roots Of Liberal Rage*, Race Class 2008, Vol. 50(2): 44-45

⁷ Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS; Suara dan Syariah*, Gramedia, Jakarta. 2012. Hal. 48.

ideolog Islamis mendefinisikan Islam sebagai Ideologi sosial politik. Bagi Bubalo dan Fealy, tujuan akhir Islamisme itu sendiri adalah pendirian negara atau sistem Islam.⁸ Meskipun demikian, gerakan Islamisme itu sendiri tidaklah monolitik. Ada beberapa faksi di dalam Islamisme, tapi tujuannya sama, yakni mendirikan negara Islam, atau setidaknya sistem yang berdasarkan ideologi Islam.

Kalau ditelusuri secara saksama, eksistensi gerakan ini sebenarnya sejalan dengan gerakan revivalisme Islam yang dipertautkan dengan gerakan kebangkitan Islam yang dipelopori oleh Ibn Taimiyyah, Muhammad Abduh, Muhammad bin Abd. Al-Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, dan Rasyid Ridha di dunia Islam, yang kemudian masuk dan berkembang di Indonesia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Dalam konteks Indonesia, fenomena gerakan Islam politik terjadi pada wilayah pemaknaan pada tingkat implementasi isu dan simbol. Kalangan Islam politik meyakini bahwa harus diwujudkan secara simbolik dalam politik, sedangkan kalangan Islam substantif menentang kehadiran partai Islam dan simbolisasi syariat oleh Negara. Kalangan Islam substantif atau liberal (kebanyakan kalangan muda yang bergabung dalam JIL) menolak seluruh bentuk perjuangan yang hendak melegalformalkan Islam dalam politik. Bagi kelompok ini, usaha simbolisasi syariat akan mengancam integrasi dan sekaligus mencemarkan makna hakiki agama. Pencampuran antara agama dengan politik, tidak saja keliru dan salah tetapi juga agama hanya sekedar dijadikan alat untuk meraih kepentingan politik kaum elit. Sebaliknya, kalangan yang memperjuangkan syariat (formalisasi/symbolisasi) berkeyakinan bahwa Islam adalah agama yang integratif, Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara, antara dunia dan akhirat dan pemisahan dalam bentuk apapun. Oleh kalangan ini, mereka yang menghendaki pemisahan tersebut termasuk sekuler.⁹ Hal ini adalah imbas dari era reformasi yang mendatangkan liberalisasi politik.

Situasi ini telah memungkinkan lahirnya partai-partai politik dalam jumlah yang sangat banyak. Di antara organisasi-organisasi politik yang muncul itu adalah partai-partai yang mempunyai *social origin* Islam. Partai politik pun mulai “kembali menemukan momentum” dirinya untuk memikat masyarakat. Simbol-simbol agama mulai kembali menjadi “komoditas” yang dianggap mampu meningkatkan perolehan suara. Sebagai kelanjutan dari asal-usul sosial demikian itu, ada partai yang menegaskan diri sebagai partai Islam. Ini terutama tampak dalam simbol dan azas partai. Ada pula yang merasa tidak perlu menyatakan diri sebagai partai Islam. Meskipun begitu, publik tetap menganggapnya sebagai partai Islam. Hal ini sesuai dengan realitas yang ada, bahwa secara mencolok pendukung partai-partai itu, baik yang menyatakan secara resmi partai Islam atau tidak, adalah komunitas Islam.

⁸ Bubalo dan Fealy, *Joining the Caravan?* Jakarta, 2005.hal.9

⁹ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia; Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008. h. 200.

Hanya dalam waktu beberapa bulan setelah reformasi dimulai, Indonesia mempunyai lebih dari 170 partai. Partai-partai yang menggunakan label agama sudah berada di atas angka 50-an, termasuk partai-partai Islam. Meskipun demikian, melalui proses verifikasi, hanya 48 partai yang dinilai layak mengikuti pemilu. Meskipun pada akhirnya pada pemilihan umum 2014 nanti jumlah partai di Indonesia mengerucut kembali menjadi 12 dan hampir stenganya adalah partai-partai berideologi Islam atau menimal mempunyai basis massa Islam.

Dalam konteks Islam, perkembangan ini telah melahirkan penilaian tersendiri. Yang paling umum adalah pandangan mengenai munculnya kembali kekuatan politik Islam. Pandangan ini dianggap sah-sah saja, karena satu hal yang harus diingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Langsung atau tidak, kenyataan ini akan mempunyai implikasi politik. Dengan kata lain, kekuatan politik apapun, lebih-lebih partai politik, akan sangat memperhitungkan realitas demografis seperti itu. Artinya, bahwa massa Islam bakal diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan politik guna mencari dukungan.

Realitas di atas seakan mempertegas bahwa fenomena agama selalu mengiringi perjalanan sejarah perpolitikan di Indonesia. Berawal dari tanggal 22 Juni 1945 ketika Panitia Sembilan berhasil merumuskan rancangan *mukaddimah* (pembukaan) Hukum Dasar yang memuat tentang Pancasila. Rancangan ini kemudian diberi nama oleh Mr. Moehammad Yamin sebagai Jakarta Charter atau Piagam Jakarta dimana Sila Pertama berbunyi *Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*.

Selain itu, dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat alinea yang berbunyi “*Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan dorongan oleh keinginan luhur, supaya bekehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya* “. Kalimat ini merupakan ungkapan hati nurani bangsa Indonesia yang diungkapkan sebelum Proklamasi kemerdekaan, sehingga dapat disebut *Declaration of Indonesian Independence*.¹⁰

Dua contoh di atas semakin menegaskan bahwa perpolitikan di Indonesia selalu dilingkupi oleh nuansa-nuansa agama. Artinya ada semangat religius yang terbina dalam kerangka untuk mengakomodir dan mengapresiasi bagi agama-agama lainnya terutama yang sudah ada sejak Indonesia masih era kerajaan.

Secara historis, fenomena agama dalam kehidupan politik muncul ketika akan digelar Pemilu 1955. Saat itu bermunculan partai-partai yang berlabel agama seperti Partai Masyumi¹¹, Partai Sarekat Islam Indonesia dan Partai Katolik. Padahal waktu Pemilu pertama pasca kemerdekaan itu dilaksanakan

¹⁰Tim Fakultas Filsafat UGM (2003). *Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka. hlm. 2.34.

¹¹ Unsur Nahdlatul Ulama (NU) kemudian memisahkan diri dari Masyumi dan mendirikan Partai NU berdasarkan hasil Kongres di Palembang tanggal 30 Agustus 1952. Untuk lebih jelasnya baca tulisan Daniel Dhakidae yang berjudul *Partai-Partai Politik Indonesia: Kisah Pergerakan dan Organisasi dalam Patahan-Patahan Sejarah* terbitan Litbang Kompas Tahun 1999.

maka partai-partai non agama-lah yang memenangkan 61 persen suara di lembaga perwakilan, Islam menguasai 30 persen dan yang berorientasi Kristen 0,29 persen. Artinya meskipun mayoritas Bangsa Indonesia adalah Islam, tetapi tidak serta merta partai Islam memperoleh suara yang signifikan.

Berdasarkan historis singkat di atas, semakin menunjukkan bahwa agama dan pemeluknya telah memainkan peran penting dalam kehidupan politik di Indonesia. Bahkan tidak jarang agama mempunyai posisi tawar yang cukup “menggiurkan” bagi oknum yang mengambil keuntungan.

Pada Pemilu Pertama tahun 1955 suara Partai Islam yang diwakili Partai Masyumi dan Partai NU masing-masing memperoleh 57 dan 45 kursi dari jumlah total kursi 257 di Parlemen atau masing-masing memperoleh 20,9 % dan 18,4 % dari seluruh total suara. Dan pada pemilu-pemilu selanjutnya suara gabungan Partai Islam tidak pernah lebih baik dari perolehan dalam Pemilu 1955 tersebut.

Beberapa survei lain juga menunjukkan bahwa massa pendukung partai-partai politik yang berbasis Islam yang menyatakan diri netral, seperti PAN dan PKB, terbukti lebih banyak memberikan suaranya kepada partai-partai yang tidak berbasis Islam. Hasil survei pada pemilu 2004-2009 mencatat bahwa partai-partai yang berbasis Islam tidak sebanding dengan rasio pemilih umat Islam. Hal ini bisa dilihat hasil pemilihan umum 2009 DPR RI.

Tabel. 1
Hasil Pemilu 2009

No.	Partai	Suara	%	Kursi
1.	Partai Demokrat	21. 703.137	20,85	148
2.	Partai Golkar	15. 037.757	14,45	107
3.	PDIP	14. 600.091	14,03	94
4.	PKS	8. 206.955	7,88	57
5.	PAN	6.254.580	6,01	46
6.	PPP	5. 533.214	5,32	37
7.	PKB	5. 146.122	4,94	28
8.	Partai Gerindra	4. 646.406	4,46	26
9.	Partai Hanura	3. 922. 870	3,77	17
10.	Lain-Lain*	19.048.653	18,29	0

*Terdiri dari 29 partai yang tidak lolos PT, karena itu tidak memperoleh kursi di DPR pusat. Sumber: KPU

Dari data yang ada di atas, terlihat bahwa pemilu 2009 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu ini diikuti oleh 38 partai nasional dan enam partai lokal. Hasilnya, seperti yang terlihat di tabel di

atas, hanya sembilan partai yang memperoleh suara lumayan. Dari sembilan partai ini, tujuh di antaranya adalah partai-partai yang sudah ada sebelumnya. Hanya dua partai baru yang masuk di dalamnya, yaitu Partai Gerindra dan Partai Hanura. Sebagian besar partai-partai (baru) lainnya, tidak memperoleh suara yang berarti. Dengan kata lain, distribusi perolehan suara di dalam pemilu pada dasarnya lebih terkonsentrasi pada sejumlah partai dan tidak kepada semua partai termasuk di dalamnya adalah partai-partai Islam, seperti PKS, PAN, PPP, dan PKB. Meskipun secara alamiah hanya partai-partai tertentu saja yang memperoleh dukungan riil dari para pemilih, tetap yang menjadi sorotan adalah partai-partai yang berbasis dukungan massa riil Islam justru kalah dengan jumlah suara yang signifikan oleh partai-partai yang notabene bukan partai Islam. Tentu hal ini menjadi tanda tanya besar apakah massa pemilih Islam sudah mengalami pergeseran perilaku dalam memilih, atau perilaku politik Islam secara umum sudah mengalami polarisasi tertentu yang tidak terlalu mengedepankan fanatisme keagamaan mereka atau bahkan umat Islam sebagian besar tidak ikut terlibat atau berpartisipasi dalam politik dengan alasan-alasan tertentu. Bahwa yang jelas fenomena seperti ini adalah persoalan serius yang harus ditemukan jawabannya.

Pada sisi yang lain, Lembaga Survei Indonesia (LSI) ketika merilis *Moslem Youth Survey* antara tanggal 18-26 November 2010, yang mensurvei tingkat ketertarikan umat Islam dalam politik (*Interested in Politics*) dengan sampel 1496 responden di 33 Propinsi dengan sistem *multistage random sampling* dengan hasil sebagai berikut:

Tabel. 2
Moslem Youth Survey 2010

Interested in Politics	
<i>Moslem Responden</i>	
Highly Interested	: 5,5 %
Interested	: 23,1 %
Litle Interested	: 41,4%
Not All Interested	: 28,9 %
DA/DK	: 1,1 %

Margin of error around: +/-2.6% at 95%

Hasil survey di atas semakin mempertegas bahwa tingkat partisipasi politik umat Islam selama ini kurang begitu bagus. Hal ini merupakan persoalan tersendiri di kalangan internal umat Islam terkait perilaku politik mereka. Lebih lanjut, LSI juga melakukan survei tentang *Pemilih Mengambang dan Prospek Perubahan Kekuatan partai Politik*, hasilnya adalah bahwa hubungan antara pemilih dengan partai sangat lemah. Setelah 12 tahun mengalami pemilihan umum, pemilih semakin merasa jauh dengan partai. Akibatnya

tingkat partisipasi dalam tiga Pemilu sebelumnya menurun tajam (sekitar 20%), dan perubahan pilihan dalam tiap pemilihan umum semakin besar. Kalaupun warga memilih sekarang, pilihan mereka mengambang, dan mudah berubah kembali, seperti dalam Pemilu 1999, 2004, dan 2009. Pemilih yang loyal sangat kecil (20%). (Survey dilakukan antara tanggal 15-25 Mei 2011).

Persoalannya sekarang adalah, apakah pergeseran perilaku pemilih semacam ini sehat bagi perkembangan kehidupan politik Indonesia ke depan? Apakah dengan rendahnya minat dan partisipasi politik merupakan preseden buruk dalam proses demokratisasi di Indonesia? Lalu bagaimana dengan umat Islam sebagai penduduk mayoritas menanggapi fenomena politik seperti ini? Tentu hal ini harus dijawab khususnya umat Islam sebagai penduduk mayoritas di negeri ini.

III. Perspektif Perilaku dan Budaya Politik

Bagi Ramlan Surbakti, perilaku politik adalah perilaku yang bersangkutan dengan proses politik.¹² Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa yang selalu melakukan kegiatan politik adalah pemerintah (lembaga dan peranannya) dan partai politik karena fungsi mereka dalam bidang politik. Dengan kondisi seperti itu, maka perilaku politik dibagi dua, yaitu perilaku politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah, dan perilaku politik warga negara biasa (baik individu maupun kelompok).

Terdapat lima pendekatan dalam memahami perilaku pemilih, yakni, pendekatan struktural, sosiologis, ekologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional. *Pertama*, pendekatan struktural, yaitu melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan, dan program yang ditonjolkan oleh setiap partai.

Kedua, pendekatan sosiologis, yakni cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Kongkritnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama.

Ketiga, Pendekatan ekologis, yakni hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. *Keempat*, pendekatan psikologi sosial identik dengan perilaku politik. Perilaku politik sangat terkait dengan political institution yang mana keduanya sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia.¹³ Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai

¹² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 2010. Hlm. 20-21.

¹³ John T. Jost and Jim Sidanius (ed.), *Political Psychology*, Psychological Press, New York, 2004. Hlm. 1.

tertentu. Artinya bahwa, partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.

Akhirnya pendekatan *kelima* adalah pendekatan pilihan rasional lebih melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih?. Pendekatan rasional ini tidak selalu memuaskan karena cukup banyak warga masyarakat menggunakan hak pilih sebagai kebanggaan psikologis, seperti menunaikan kewajiban sebagai warga negara, menegaskan identitas kelompok, dan menunjukkan loyalitas terhadap partai.

Keempat pendekatan di atas sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan kegiatan otonom, dalam arti bahwa dalam memilih tanpa ada paksaan dari pihak lain. Meskipun dalam kenyataannya, perilaku pemilih juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu.¹⁴

Pada dasarnya, sebuah tindakan rasional akan selalu didasarkan pada untung (*benefit*) dan ruginya (*cost*) sebuah pilihan tindakan tersebut diambil. Dalam pilihan tindakan untuk mendukung atau mempercayai sebuah partai politik, masyarakat juga mengkalkulasikan untung dan ruginya keputusan mereka dalam mendukung partai tertentu.

Model pilihan rasional (*Rational Choice Model*) pertama kali diperkenalkan oleh Anthony Downs (1957) sebagai salah satu pendekatan dalam melihat atau menelusuri pola dukungan masyarakat terhadap partai politik.¹⁵ Teori pilihan rasional mengasumsikan bahwa masyarakat pemilih mengetahui apa yang mereka inginkan dan menjadi kebutuhan mereka, mengevaluasi program atau kandidat dan kinerja partai politik dan menyesuaikannya dengan kepentingan mereka, dan menetapkan pilihan tindakan atau dukungan mereka terhadap partai politik. Anthony Downs mengemukakan bahwa dalam menentukan dukungannya terhadap partai politik masyarakat memiliki pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dalam sikap atau tindakannya, antara lain;

- a. Keuntungan atau manfaat yang telah diberikan oleh pemerintah yang sedang berkuasa pada saat itu.
- b. Pemilih mengasumsikan mereka akan menerima keuntungan atau manfaat dari partai politik yang akan berkuasa.

Pemilih membandingkan antara satu partai politik dengan partai politik dengan yang lainnya dengan mempertimbangkan partai mana yang akan memberikan manfaat atau keuntungan lebih yang akan mereka terima.

Selanjutnya untuk mendalami lebih mendalam terkait fenomena perilaku pemilih selalu berubah-ubah, Robert Dahl memilih budaya politik

¹⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 2010. Hlm. 188.

¹⁵ Harrop & Miller 1987, *Election and Voters; A Comparative Introduction*” McMillan Press LTD. London. Hlm.145-153.

sebagai faktor yang bisa menjelaskan pola-pola perilaku politik yang berubah-ubah tersebut. Bagi Dahl, elemen-elemen utama dalam budaya politik adalah:

1. Orientasi menyelesaikan masalah; adakah mereka pragmatis atau rasional?
2. Orientasi tindakan kolektif; adakah mereka bekerjasama atau tidak?
3. Orientasi sistem politik; mereka taat atau memencilkan diri?
4. Orientasi orang lain; adakah mereka beramanah atau tidak?¹⁶

Budaya politik menarik untuk dipelajari karena dua alasan, yakni;¹⁷

- a. Sikap warga negara terhadap sistem politik jelas mempengaruhi macam-macam tuntutan yang diminta, cara-cara tuntutan itu diutarakan, respon dan golongan elit. Intinya bahwa orientasi-orientasilah yang menentukan pelaksanaan sistem politik.

Dengan pendekatan budaya politik akan mempertinggi kemampuan kita menggambarkan dan menganalisa interaksi antara sistem politik dan budayanya serta dapat membedakan antara tingkah laku dan sikap politik seseorang.

- b. Dengan mengerti akan sifat dan hubungan antara budaya politik dan pelaksanaan sistemnya, maka kita minimal dapat mendapatkan cara-cara yang mungkin membawa perubahan-perubahan politik yang pesat.

Dengan pendekatan budaya politik akan menolong kemampuan kita untuk menjelaskan dan menganalisa interaksi antara sistem politik dan budayanya dengan membedakan tingkah laku dan sikap dalam sistem politik dan struktur dari segi budaya.¹⁸ Konsep budaya politik setidaknya akan membantu menjelaskan gejala yang sebagian besar sama di antara daerah-daerah yang menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Budaya politik tidak lain adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat.¹⁹ Gabriel Almond dan Sydney Verba (1963) mendefinisikan budaya politik sebagai orientasi psikologis terhadap obyek sosial, atau sebagai sikap terhadap sistem politik dan terhadap diri sebagai seorang aktor politik.²⁰ Orientasi ini termasuk pengetahuan atau kepercayaan, perasaan atau afeksi, dan evaluasi atau penilaian terhadap sistem politik secara umum, *input* dan *output* politik, dan peran seseorang dalam sistem politik. Diyakini bahwa variasi di dalam orientasi dan sikap ini mempengaruhi partisipasi politik dan penerimaan terhadap sistem demokrasi, yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas demokrasi.

Almond dan Verba meyakini bahwa variasi dalam orientasi politik menghasilkan tiga jenis budaya politik: yakni budaya politik parokial (*parochial*), budaya politik subjek, dan budaya politik partisipan. Studi budaya

¹⁶ Dennis Kavanagh, 1987. *Political Culture*, Terjemahan, Samaruddin MD Rejab, (Budaya Politik), Dewan Pustaka. Hlm. 2-3.

¹⁷ Dennis Kavanagh, *Kebudayaan Politik*, Bina Aksara, Jakarta, 1982. Hlm. 15.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Saiful Mujani, *Muslim Demokrat; Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, Gramedia, 2007. Hlm. 3

politik ini secara sistematis juga menerapkan perspektif *civic culture* (budaya kewargaan) yang pertama kalinya dikembangkan oleh Gabriel Almond dan Sydney Verba (1963). Dengan memfokuskan perhatian pada sikap, kepercayaan, dan orientasi, perspektif ini paling dekat dengan perspektif yang dikembangkan Huntington. Dalam pendekatan budaya politik (*political culture*) akan ditemukan bahwa perilaku politik, institusi politik, dan kinerja politik dibentuk oleh suatu proses budaya.²¹

Jauh sebelum jatuhnya pemerintahan Orde baru, William Liddle (1998) menempatkan budaya politik Indonesia di dalam konteks transformasi dari budaya politik tradisional ke budaya politik moderen. Budaya politik tradisional dipengaruhi oleh beragam etnis, agama, dan budaya-budaya lokal lainnya. Sementara itu, budaya politik moderen dipengaruhi oleh budaya barat. Di dalam budaya demikian relasi antara pemimpin dan yang dipimpin bercorak *patron-client*. Olehnya itu, menurut Liddle, '*the leader should be benevolent and the people should be obedient*' (Liddle, 1998:1).

Pola *patron-client* di dalam perilaku pemilih masih cukup kuat, meskipun belakangan ini sudah mengalami perubahan-perubahan. Implikasi dari masih kuatnya budaya politik semacam itu telah membuka ruang bagi para wakil untuk melakukan *ignorance* terhadap orang-orang yang diwakilinya. Adanya *disconnect electoral* yang terjadi merupakan refleksi dari belum tumbuh kuatnya budaya politik kewarganegaraan memungkinkan adanya *civic engagement* atau relasi yang lebih baik antara pemimpin dan yang dipimpin.

IV. Aktivisme Islam Pasca Reformasi

Di Indonesia, seiring dengan berkembangnya kehidupan perpolitikan nasional ketika memasuki era reformasi, jalur-jalur demokrasi dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam berbagai proses politik secara sukarela. Era reformasi juga memasuki babak baru dengan mendatangkan liberalisasi politik. Situasi ini telah memungkinkan lahirnya partai-partai politik dalam jumlah yang sangat banyak. Islam juga mengambil bagian yang besar dalam era demokratisasi tersebut. Buktinya, bahwa di antara organisasi-organisasi politik yang muncul itu adalah partai-partai yang mempunyai *social origin* Islam. Partai politik pun mulai "kembali menemukan momentum" dirinya untuk memikat masyarakat. Simbol-simbol agama mulai kembali menjadi "komoditas" yang dianggap mampu meningkatkan perolehan suara. Sebagai kelanjutan dari asal-usul sosial demikian itu, ada partai yang menegaskan diri sebagai partai Islam. Ini terutama tampak dalam simbol dan asas partai. Ada pula yang merasa tidak perlu menyatakan diri sebagai partai Islam. Meskipun begitu, publik tetap menganggapnya sebagai partai Islam. Hal ini sesuai dengan realitas yang ada, bahwa secara jelas pendukung partai-partai itu, baik yang menyatakan secara resmi partai Islam atau tidak, adalah komunitas Islam.

²¹ *Ibid.*

Dalam konteks Islam, perkembangan ini telah melahirkan penilaian tersendiri yakni pandangan mengenai munculnya kembali kekuatan politik Islam. Pandangan ini dianggap boleh saja, karena satu hal yang harus diingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Langsung atau tidak, kenyataan ini akan mempunyai implikasi politik. Dengan kata lain, kekuatan politik apapun, lebih-lebih partai politik, akan sangat memperhitungkan realitas demografis seperti itu. Artinya, bahwa massa Islam bakal diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan politik guna mencari dukungan. Meskipun dalam wilayah tertentu, artikulasi (pemikiran politik Islam) masih tetap didominasi oleh kemahuan ideologis untuk melegitimasi rezim-rezim masyarakat Islam dewasa ini.²²

Pada sisi yang lain, bahwa di era baru itu bukan hanya lahir partai-partai politik yang mengusung politik aliran baik dari kalangan Islam maupun golongan masyarakat lainnya, tetapi juga organisasi-organisasi atau gerakan-gerakan keagamaan yang membawa misi dan simbol-simbol keagamaan termasuk di kalangan umat Islam. Beberapa gejala baru yang menonjol dan menimbulkan kontroversi ialah gerakan Islam yang mengusung kembali piagam Jakarta dan penerapan syariat Islam yang sering disebut berhaluan radikal atau fundamentalis seperti Majelis Mujahidin, Hizbut Tahrir, Komite Penegakan Syari'at Islam (KPPSI), dan lain-lain di luar partai politik Islam yang mengusung isu yang sama kendati tidak sekuat gerakan-gerakan Islam berhaluan militan itu. Dalam melakukan usaha-usaha penerapan syariat Islam di berbagai daerah di Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan daerah-daerah lainnya, beberapa diantaranya telah berhasil bahkan ada yang menandatangani otonomi khusus seperti Aceh.

Dalam konteks Islamisme, kehadiran partai-partai politik dan organisasi Islam bercorak Islamis atau ideologis di era reformasi tersebut telah secara terbuka menyuarakan dan mengusung kembali perjuangan menegakkan syari'at Islam melalui isu momentum amandemen UUD 1945 seperti disuarakan oleh PPP, PBB, dan PK (PKS) maupun oleh KPPSI dan Hizbu Tahrir melalui perjuangan politik parlemen maupun di luar parlemen. Bagi mereka, keyakinan akan otentitas dan kesempurnaan ajaran Islam dengan tetap mengacu kepada pengalaman sejarah generasi Islam awal. Generasi ini merupakan basis ideologis pandangan kalangan yang kukuh mempertahankan dan memperjuangkan syariah Islam sebagai penawar atas soal sosial-politik masyarakat. Barat dinilai gagal mensejahterakan tatanan sosial-politik penduduk dunia. Pada akhirnya kaum Islamis selalu mengatakan bahwa "syariah Islam adalah solusi" atas berbagai masalah sosial-politik dunia selama ini. Dalam masyarakat baru sekalipun yang hidup disekitar lingkungan Islam akan menyukai pengetahuan Islam karena Islam akan tetap memberikan jalan keluar.²³

²² Bahtiar Effendi (2001), *Teologi Baru Politik Islam; Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, Galang Press, Yogyakarta. h. 52.

²³ Burhan Ghalioun, (2010), *Islamology Comes to Aid of Islamism*, DIOGENES 226:120-126

Di lingkungan umat Islam, selain partai-partai politik berbasis formal Islam sebagaimana disebutkan, lahir pula gerakan-gerakan Islam yang mengusung cita-cita ideologi Islam seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang kedua-duanya mengusung perjuangan menegakkan syariat Islam dan kekhalifahan Islam. Sedangkan Gerakan-gerakan Islam lainnya seperti Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) di Sulawesi Selatan dan kelompok-kelompok Islam lainnya. Gerakan-gerakan Islam ini, baik yang bergerak langsung di lapangan politik menjadi partai politik maupun no-partai politik yang bercorak dakwah dan ideologis, memiliki keturunan ideologis yang relatif sama dan bahkan hingga batas tertentu mempunyai pertautan elite dan pemahannya dengan gerakan-gerakan Islam yang mengusung ide negara Islam atau Islam sebagai dasar negara di masa silam. Hal inilah yang melahirkan kecenderungan Islam yang berorientasi pada politik yang mewarnai kebangkitan kembali Islamisme maupun Islam politik di era baru yang membuka keran keterbukaan luar biasa besarnya. Situasi politik yang berkembang saat sekarang ini sangat mempengaruhi eksistensi gerakan Islam Ideologis (*Islamisme*). Bahwa iklim keterbukaan pada era reformasi memberikan peluang bagi umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk memperjuangkan aspirasinya pada ruang yang sangat luas.

Ada alasan lain mengapa fenomena gerakan Islam muncul di era keterbukaan ini yakni kepercayaan terhadap sistem dan partai-partai dengan jumlahnya yang sangat banyak. Bagaimana masyarakat membentuk kepercayaan terhadap sistem atau misalnya partai politik tersebut? Pertanyaan ini seringkali menjadi permasalahan di kalangan para pengamat politik. Apalagi ketika pertanyaan ini dihubungkan dengan sikap atau aksi masyarakat dalam mendukung partai politik dalam pemilihan umum.

Converse (1964) memperkenalkan konsep *Belief System* dalam menjawab pertanyaan tentang bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap sebuah issue atau objek politik tertentu. Sistem kepercayaan (*belief system*) merupakan elemen psikologis yang terdiri dari seperangkat nilai-nilai prinsipal yang dijadikan sebagai standar dalam penilaian terhadap issue atau objek politik tertentu. Sistem kepercayaan sangat berpengaruh pada sikap atau respon seseorang terhadap issue atau sebuah objek politik. Sistem kepercayaan menentukan posisi seseorang terhadap sebuah issue atau objek politik tertentu.

24

Kepercayaan pada partai politik, sering juga dipandang sebagai sebuah sikap dalam memandang partai politik yang menggambarkan sebuah bentuk sikap yang muncul dari interaksi masyarakat dengan partai politik. Sebagian besar pengamat dan ahli politik beranggapan bahwa sistem kepercayaan terhadap partai merupakan sebuah respon transisional warga negara terhadap pembangunan politik. Sebagian pengamat politik yang lain melihat

²⁴ Andi Ali Armunanto, (2006), *Partisipasi dan tingkat kepercayaan masyarakat Kab. Bone terhadap Partai Politik* (Tesis UGM), hlm. 39.

kepercayaan terhadap partai politik sebagai sebuah sikap yang berhubungan sangat erat dengan budaya politik masyarakat dalam sebuah negara yang dihasilkan dari proses sosialisasi politik dalam sebuah pemerintahan rezim.²⁵

Inti dari penekanan dari analisis kultural adalah interpretasi terhadap sebuah wacana politik yang dibangun dari pengalaman individu atau kelompok untuk memaknai lingkungan sosial dan lingkungan politik mereka²⁶. Berbagai pengalaman yang dilalui oleh individu akan membentuk orientasinya dalam menginterpretasikan setiap obyek politik yang dihadapinya.

Dalam *Toward General Theory of Action*, Parsons dan Shills mengemukakan bahwa orientasi dari tiap individu terdiri atas 3 komponen antara lain; Komponen *Kognitif*, *Afektif* dan *Evaluatif*.²⁷ Komponen kognitif adalah pengetahuan tentang sistem politik, orang atau institusi yang terlibat didalamnya serta input dan outpunya. Komponen Afektif adalah perasaan terhadap sistem politik, perannya, personil dan kinerjanya. Komponen Evaluatif adalah penilaian dan opini tentang objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi nilai standar dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Ketiga komponen ini membentuk orientasi seseorang yang menyusun predesposisinya dalam menginterpretasikan setiap objek politik yang dihadapinya.

V. Penutup

Sebagai sebuah alat untuk memahami kehidupan, Islam sering dianggap sebagai sesuatu yang lebih dari pada sekedar sebuah agama. Ada yang melihatnya sebagai suatu “masyarakat sipil”. Ada juga yang menilainya sebagai suatu sistem “peradaban yang menyeluruh”. Bahkan ada pula yang mempercayainya sebagai suatu “agama dan Negara”. Apa yang ada dibalik rumusan-rumusan itu, pada dasarnya adalah pandangan umum bahwa Islam itu lebih dari sekedar sistem ritus dan atau ideologi. Lebih khusus lagi, Islam tidak mengenal dinding pemisah antara yang bersifat spiritual dan temporal. Sebaliknya, Islam memberikan panduan (etis) bagi setiap aspek kehidupan.

Secara substansial politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku (*political behavior*) serta budaya politik (*political culture*) yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Negara ataupun masyarakat Islam adalah suatu masyarakat yang berdasarkan kepada keyakinan bersama mengenai ke-Tuhanan. Bahwa dalam Islam juga tidak ada pemisahan antara spiritual dengan yang duniawi, keduanya menyatu dalam bingkai doktrinal Islam, ia menyatu karena pemahaman atas doktrin

²⁵ Torcal, Gunther & Montero “ *Anty-Party Sentiment in Southern Europe*” dalam Ghunter, Montero & Linz (2001) “ *Political Parties; Old Concept and New Challenge*” Oxford University Press, New York; hlm.259.

²⁶ Mark Howard Ross” *Culture and Identity in Comparative Politics*” dalam Lichbach & Zuckerman 1997 “ *Comparative Politics; Rationality, Culture dan Structure*” Cambridge University Press, New York. Hlm. 42-74.

²⁷ James A. Bill 1973, “ *Comparative Politics; The Quest of Theory*” Bell & Howell Company, Ohio. Hlm. 86-87.

yang integratif. Dalam konteks seperti itu, wacana menjadi sesuatu yang sangat penting dan menentukan. Diskursuslah yang menjadi dasarnya mempengaruhi dan membentuk pandangan orang tentang politik dan atau ideology Islam. Oleh karena itu, aktivisme Islam dalam pelbagai bentuk perilakunya adalah sebuah fenomena yang akan terus mewarnai kehidupan politik Indonesia sebagai konsekuensi dari pemikiran dan ideologi yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdel Salam Sidahmed and Anoushiravan Ehteshami. (ed.). 1996. *Islamic fundamentalism*. Westview Press.
- Anthony Bubalo, Greg Fealy & Whit Mason. 2012. *Zealous Democrats: Islamism and Democracy in Egypt, Indonesia and Turkey*. Terjemahan oleh Syamsu Rijal, PKS dan Kembarannya; Bergiat jadi demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki. Jakarta, Komunitas Bambu.
- Anthony Oberschall. 1973. *Social conflicts and social movement*. New Jersey: Prentice Hall.
- Anhar Gonggong. 2004. *Abdul Qahhar Muzakkar dari patriot hingga pemberontak*. Yogyakarta: Ombak.
- Azyumardi Azra. 1996. *Pergolakan politik Islam dari fundamentalisme, modernisme, hingga Post-modernisme*. Jakarta: Paramadina.
- Bernhard Platzdasch. 2009. *Islamism in Indonesia; Politics in the emerging democracy*. Singapore.
- Bahtiar Effendi. 2000. *Repolitikasi Islam; pernahkah Islam berhenti berpolitik?*. Bandung: Mizan.
- Burhanuddin Muhtadi. 2012. *Dilema PKS; suara dan syariah*. Jakarta: Gramedia.
- G.H. Jansen. 1980. *Islam Militan; Sebuah uraian dan analisis yang tajam tentang konfrontasi antara Islam dengan barat saat ini*. Terjemahan, *Militant Islam; An informed and incisive analysis of Islam's confrontation with the western world today*. Bandung: Pustaka.
- Greg Fealy, 2004. *Islamic radicalism in Indonesia: The Faltering revival*, Southeast Asian affairs 2004 (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies).
- Haedar Nashir. 2007. *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi salafiyah ideologis di Indonesia*, Jakarta: RMBOOKS.
- Muhammad Rahmat Imdadun. 2003. *Transmisi Gerakan Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia 1980-2002: Studi atas gerakan tarbiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia*. Tesis Master, Universitas Indonesia.

- Nazih Ayubi. 1991. *Political Islam; religion and politics in the Arab world*. London: Routledge.
- John Calvert. 2008. *Islamism: A documentary and reference guide*. India: Green Wood Press.
- John L. Esposito, (ed.). 1997. *Political Islam; revoultion, radicalism, or reform?.* London: Lynne Rienner, Inc.
- John L. Esposito. 1990. *Islam dan Politik*, Terjemahan, Jakarta: Bulan Bintang.
- Mark Howard Ross" Culture and Identity in Comparative Politics" dalam Lichbach & Zuckerman 1997 "Comparative Politics; Rationality, Culture dan Structure" Cambridge University Press, New York.
- James A. Bill 1973, "Comparative Politics; The Quest of Theory" Bell & Howell Company, Ohio.
- Masdar Hilmy .2010. *Islamism and Democracy in Indonesia; piety and pragmatism*, Singapore.
- Olivier Roy. 1994. *The Failure of Political Islam*. London: I.B. Tauris Publishers, London.
- Peter R. Demant. 2006. *Islam vs Islamism: the dilemma of the muslim world*, London.
- Laura Guazzone. 1995. *The Islamist Dilemma; the political role of Islamist movement in the Arab world*, UK: Ithaca Press, UK.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 2010.
- Samuel P. Huntington. 1996. *The Clash of Civilizations and the remaking of world order*, New York.
- Samuel Graham Wilson. 1976. *Modern Movemets Among Moslems: scholarly resources*. Inc, New York.
- Saiful Mujani. 2007. *Muslim Demokrat; Islam Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta: Gramedia.
- The Emirates Center for Strategic Studies and Research. 2003. *Islamic Movements; impact on political stability in the Arab world*. Abu Dhabi.
- Torcal, Gunther & Montero " Anty-Party Sentiment in Southern Europe" dalam Ghunter, Montero & Linz (2001)" *Political Parties; Old Concept and New Challenge*" Oxford University Press, New York.

Jurnal:

- Burhan Ghalioun. 2010. Islamology Comes to the Aid of Islamism, *Diogenes*, 257: 120.

- Daniel Pipes. 2000. Islam and Islamism: Faith and Ideology, *The National Interest*, Washington. 87-93.
- Hussin Muthalib. 1990. Islamic Revivalism in ASEAN States: Political Implication, *Asian Survey*, Vol. 30, No.9. 877-891.
- William I. Robinson. 2010. Globalization and Social Movements: Islamism, Feminism, and the Global Justice Movement *Contemporary Sociology: A Journal of Reviews*. 39: 187
- Peter Baehr. 2011. Marxism and Islamism: Intellectual conformity in Aron's time and our own. *Journal of Classical Sociology*. 11:173.
- Arun Kundnani. 2008. Islamism and the roots of liberal rage, *Race Class*, 50: 40
- Chistopher Houston, 2004, *Islamism, Castoriadis and Autonomi* Number 76. SAGE Publications (London, Thousand Oaks, CA and New Delhi). 49-69.
- Ali Riaz. 2004. *God Willing: The Politics of Islamism in Bangladesh*. Lanham, MD: Rowan and Littlefield. pp. 23.